

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
615	BELANJA	187.017.267,00	187.017.267,00	100,00	
616	BELANJA OPERASI	187.017.267,00	187.017.267,00	100,00	
617	Belanja Pegawai	187.017.267,00	187.017.267,00	100,00	-
618	Belanja Gaji dan Tunjangan	187.017.267,00	187.017.267,00	100,00	-
619	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	135.378.720,00	135.378.720,00	100,00	-
620	Tunjangan Keluarga	12.296.135,00	12.296.135,00	100,00	-
621	Tunjangan Jabatan	17.365.000,00	17.365.000,00	100,00	-
622	Tunjangan Fungsional	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	-
623	Tunjangan Fungsional Umum	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00	-
624	Tunjangan Beras	7.459.280,00	7.459.280,00	100,00	-
625	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	525.901,00	525.901,00	100,00	-
626	Pembulatan Gaji	1.823,00	1.823,00	100,00	-
627	Iuran Jaminan Kesehatan	6.835.785,00	6.835.785,00	100,00	-
642	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	324.905,00	324.905,00	100,00	-
643	Iuran Jaminan Kematian	974.728,00	974.728,00	100,00	-
2 142	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	187.017.267,00	187.017.267,00	100,00	
2 144	SURPLUS/(DEFISIT)-LRA	(187.017.267,00)	(187.017.267,00)	100,00	

Selubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan nama dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diundangkan tanggal 8 Januari 2020. Gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi2020	%	Realisasi2019
1	2	3	4	5	6
24	BELANJA	10.982.065.493,00	10.044.591.053,00	91,46	
25	BELANJA OPERASI	10.407.065.493,00	9.594.691.053,00	92,19	
26	Belanja Pegawai	2.600.000.000,00	2.531.715.716,00	97,37	-
27	Belanja Barang dan Jasa	7.807.065.493,00	7.062.975.337,00	90,47	-
32	BELANJA MODAL	575.000.000,00	449.900.000,00	78,24	
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	275.000.000,00	68,75	-
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.000.000,00	174.900.000,00	99,94	-
73	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.982.065.493,00	10.044.591.053,00	91,46	
74	SURPLUS/(DEFISIT)-LRA	(10.982.065.493,00)	(10.044.591.053,00)	91,46	

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik tidak menerima pendapatan.

Capaian bagian belanja sebesar 91,46 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, yang terdiri dari :

Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.531.715.716,00 atau 97,37%.

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.807.065.493,00 terealisasi sebesar Rp. 7.062.975.337,00 atau 90,47%.

2. Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 449.900.000,00 atau 78,24%.

III.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut. Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
2. Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.